

**STRATEGI POLITIK KEMENTERIAN PERTAHANAN ATAS
KONFLIK LAUT NATUNA UTARA PERIODE 2019-2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Andalas



Oleh:

NANDO MUHAMAD

No. BP 1910832033

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Nando Muhamad, 1910832033. Skripsi dengan judul Strategi Politik kementerian pertahanan atas konflik laut natuna utara periode 2019-2022. Sebagai pembimbing I Dewi Anggraini S.IP, M.Si dan pembimbing II Drs Tamrin. M,Si

Penelitian ini didasarkan pada maraknya kasus nelayan China masuk perairan Indonesia juga mencuri ikan di wilayah Laut Natuna Utara dibarengi oleh *Coast Guard* China yang menjaga aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan China tersebut, wilayah Laut Natuna Utara juga merupakan wilayah strategis dalam bentuk jalur perdagangan sehingga wilayah tersebut sangat berharga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan strategi politik yang diambil oleh kementerian pertahanan untuk merespon konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara pada periode 2019-2022. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi politik yang diambil oleh kementerian pertahanan adalah dengan tegas menolak segala bentuk negosiasi dan perundingan di hukum internasional dan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak mengakui adanya sengketa dengan China atas wilayah Laut Natuna Utara dengan hal itu menegaskan bahwa wilayah tersebut sepenuhnya merupakan milik pemerintah Indonesia, Kemenhan juga menggunakan nama Laut Natuna Utara dibanding laut China Selatan untuk menegaskan kepemilikan Indonesia atas wilayah tersebut, Kemenhan mengirimkan kapal perang untuk meng-*counter* kapal *Coast Guard* China, selain itu Kemenhan merundingkan batas wilayah ZEE dengan Vietnam untuk melawan klaim China, beberapa strategi yang dijalankan oleh kementerian pertahanan juga memengaruhi kebijakan yang diambil oleh China atas Laut Natuna Utara tersebut.

Kata kunci: Laut Natuna Utara, Strategi Politik, Kementerian Pertahanan



ABSTRACT

Nando Muhamad, 1910832033. Thesis entitled Political Strategy of the Ministry of Defense for the North Natuna Sea conflict for the 2019-2022 period. As supervisor I Dewi Anggraini S.IP, M.Si and supervisor II Drs Tamrin. M,Si

This research is based on the rampant cases of Chinese fishermen entering Indonesian waters as well as stealing fish in the North Natuna Sea region, accompanied by the Chinese Coast Guard guarding the fishing activities carried out by the Chinese fishermen. The North Natuna Sea region is also a strategic area in the form of trade routes, so the area is very valuable. The purpose of this study is to analyze and explain the political strategies taken by the defense ministry to respond to conflicts that occurred in the North Natuna Sea in the 2019–2022 period. The method used in this research is a qualitative approach with purposive sampling. The data collection technique that researchers used in this study was in-depth interviewing. The data analysis technique that researchers use is the data triangulation technique, commonly called data verification using triangulation informants. The results of the reaserch show that the political strategy taken by the Ministry of Defence is to firmly reject all forms of negotiation and agreement in international law and state that the Indonesian government does not recognize the existence of a dispute with China over the North Natuna Sea area by stating that the area fully belongs to the Indonesian government, The Ministry of Defense also uses the name North Natuna Sea instead of the South China Sea to establish Indonesia's ownership of the area, the Ministry of Defense also sends warships to counter Chinese Coast Guard ships, besides that the Ministry of Defense negotiates the EEZ boundaries with Vietnam to counter China's claims, several strategies that carried out by defense defense also influences the policies taken by China over the North Natuna Sea

Keywords: North Natuna Sea, Political Strategy, Ministry of Defense

